

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Oleh:

Anak Agung Adi Lestari
Ni Putu Noni Suharyanti

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrack

Tourism has an important role in economic development in various countries, including Indonesia. Tourism has become one of the leading sectors in obtaining foreign exchange. Efforts to manage tourism objects in several regions in Indonesia are currently quite increasing, this is indicated by the increasing number of tourist visits to various tourism sites in Indonesia. Because of the increase, the government needs to form a policy that is tourism policy to regulate the development of tourism while paying attention to the existing legal rules and norms that exist in the community around the tourism area in order to create public order and security for visiting tourists. Government commitment is very important in achieving success in the field of tourism. The strong commitment of the government can mobilize its resources so that tourism development can be faster and optimal. One of the seriousness of the Indonesian government in the development of the tourism sector is one of which can be seen by the existence of several laws and regulations established to regulate order in business activities in the tourism sector, one of which is the legalization of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.

Keywords: *Government Policy, Tourism, Tourism Regions.*

Abstrak

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek tempat pariwisata di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada dimasyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitmen pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Daerah Pariwisata.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sektor pariwisata merupakan hal terpenting bagi semua Negara diseluruh dunia. Setiap Negara berlomba-lomba untuk memajukan industri pariwisata di Negara mereka dikarenakan pendapatan Negara dari sektor pariwisata sangat menjanjikan dalam artian sangat besar. Hal ini tentu tidak terlepas dari perkembangan industri dari Negara lain sehingga tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi dan dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk melakukan travelling (perjalanan) ke Negara lain untuk bersantai setelah bekerja keras dan/atau untuk belajar tentang budaya dari Negara lain.

Disamping keuntungan materi yang dapat diraih dari pengembangan pariwisata, perlu diketahui pula hal tersebut tentu saja akan berdampak menciptakan suatu tantangan dalam beberapa hal yang lain diantaranya ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Tantangan ekonomi dilihat dari sejauh mana pariwisata tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata, tantangan lingkungan hidup yaitu sejauh mana pariwisata itu akan mengubah lingkungan alam yang

ada didaerah tersebut, dan tantangan sosial yaitu bagaimana perkembangan pariwisata berdampak dalam kehidupan sosial dari masyarakat setempat yaitu budaya, adat dan lainnya.

Perkembangan pariwisata yang pesat di Negara Indonesia mendorong perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya seiring dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk itu pembentukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah dalam hal produk hukum sangat dibutuhkan untuk membentuk sistem Pariwisata yang kondusif sehingga nyaman baik untuk para wisatawan maupun untuk masyarakat sekitar daerah tempat Pariwisata itu sendiri. Dengan kondusifnya keadaan pariwisata dapat mendatangkan efek positif seperti semakin banyak wisatawan yang datang sehingga semakin banyak devisa yang didapatkan serta semakin banyak investor yang tertarik dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak hanya sangat baik bagi perkembangan disektor pariwisata tapi juga baik bagi pertumbuhan disektor lainnya seperti sektor ekonomi, sektor pembangunan dan lain-lain.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata?
2. Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Memajukan Sektor Pariwisata.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah salah satu jenis kebijakan publik. Kebijakan sendiri adalah suatu serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut pendapat *Dye* seperti yang dikutip oleh *Abidin* dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik* menyebutkan bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹

Selanjutnya *Young dan Quinn* menjelaskan tentang batasan Kebijakan Publik sebagaimana yang dikutip oleh *Edi Suharto* dalam bukunya yaitu :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan public berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat

¹ *Said Zainal Abidin, 2002, Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, h. 20.*

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seorang dari beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.²

Jika melihat pada penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kebijakan publik karena pengembangan pariwisata juga merupakan kebijakan pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi terutama terkait permasalahan ekonomi dikarenakan pariwisata dipandang sebagai sebuah pilihan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru bagi suatu Negara.

Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrument kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan insentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan seperti aturan

pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, melindungi budaya lokal. Mengarahkan perilaku wisatawan yang berwawasan lingkungan pembatasan dalam penggunaan energy, menghemat sumber alam yang langka, mengurangi polusi, memberikan insentif terhadap pembangunan insfrastruktur yang juga juga bermanfaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan nasional park.

Menurut Getz terdapat 5 (lima) pendekatan dalam mengembangkan pariwisata, yaitu :

1. *Bossterm* yaitu, suatu pendekatan sederhana yang melihat pariwisata sebagai suatu atribut positif untuk suatu tempat dan penghuninya. Namun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.
2. *The Economic – industry approach* (pendekatan ekonomi – industri) yaitu, suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang tujuan ekonominya lebih didahulukan dari tujuan sosial dan lingkungan dan menjadikan

² Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta h. 44.

- pengalaman pengunjung dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.
3. *The Physical – spatial approach* (pendekatan fisik –keruangan) yaitu, pendekatan ini didasarkan pada tradisi “penggunaan lahan” geografis. Strategi pengembangannya berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip-prinsip keruangan (*spatial*). Misalnya pengelompokan pengunjung di satu kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Hanya saja kekurangan dari pendekatan ini adalah kurang mempertimbangkan dampak sosial dan kultur dari pengembangan wisata.
 4. *The Community Approach* (Pendekatan Kerakyatan), yaitu : pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat di dalam proses pengembangan pariwisata. Pendekatan ini menganggap pentingnya suatu pedoman pengembangan pariwisata yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*). Pendekatan yang dilakukan adalah menekankan pentingnya manfaat sosial dan kultural bagi masyarakat lokal secara bersama-sama termasuk didalamnya pertimbangan ekonomi dan lingkungan.
 5. *Sustainable Approach* (pendekatan berkelanjutan), yaitu : pendekatan berkelanjutan berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas sumber daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial yang memantapkan pola-pola kehidupan dan gaya hidup individual.³
- Komitmen pemerintah mempunyai peranan kunci terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan dibidang pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitmen pemerintah suatu Negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata.⁴
- Dalam pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh sehingga dapat diperoleh

³Made Bayu, 2012, *Pariwisata Bali dan Global, available from* : <http://madebayu.blogspot.com/2012/02/perencanaan-dan-pengembangan.html>. Data diakses pada tanggal 10-10-2019

⁴Hermawan, Heri, 2008, *Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 3No. 1Maret 2008, ISSN1907-9419, h.19.*

manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri.⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa hamper seluruh daerah di Indonesia terdapat potensi pariwisata maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi yang sangat diperlukan dalam perkembangan pariwisata sebagai sarana untuk memudahkan ke daerah yang dituju, keadaan infrastruktur yang sangat memadai untuk keperluan pariwisata, dan sarana-sarana pariwisata lainnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Nasional dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat hubungan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi amupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.⁶

Bisnis pariwisata memiliki sistem pengaturan tersendiri yang memiliki institusi-institusi, tradisi, azas-azas, ketentuan, standar-standar, mekanisme dan prosedur berbeda dengan perdagangan barang. Demikian juga dari segi teknik transaksi, penentuan dasar transaksi, materi transaksi, elemen-elemen kontrak, bentuk pertanggung jawaban, cara perhitungan

⁵W.Mahdayani, 2009, *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksana Nias, Unesco & Nias Selatan, Dinpubar Nias Selatan*, h. 42.

⁶*Ibid.*

risiko dan penentuan tanggung jawab hukum pelaku konsumennya.⁷

Keunikan karakteristik bisnis pariwisata ini, mendorong pemerintah untuk membuat beberapa aturan hukum guna mengakomodir kebutuhan dimasyarakat yang timbul akibat adanya kebijakan usahan pariwisata ini. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah dengan membuat regulasi yang mengatur tentang kepariwisataan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata mengantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata diharapkan mampu mengakomodir perkembangan kegiatan bisnis pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terdiri dari 17 Bab dan 70 Pasal lebih mengatur tentang asas dan tujuan kepariwisataan serta segala sesuatu tentang obyek dan daya tarik wisata, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban dan larangan, kewenangan pusat dan daerah, badan promosi pariwisata, sumber daya manusia dibidang pariwisata, sanksi administrative dan ketentuan pidana. Disamping Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, terdapat pula beberapa aturan hukum yang diciptakan diantaranya yaitu :

1. Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN).
2. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil.

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Memajukan Perkembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industry raksasa dunia yang mendorong pertumbuhan sektor ekonomi paling cepat. Sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, pariwisata telah terbukti tangguh dan memberikan dampak positif dalam hal menghasilkan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan merangsang konsumsi domestik. Sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi

⁷Ida Bagus Wiyasa Putra et. Al, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata, Cet. I, Bandung, Refika Aditama, h, 19.*

sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa untuk pembangunan tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan. Sektor pariwisata dapat memberikan efek positif yaitu diantaranya :

1. Dapat menciptakan kesempatan berusaha dalam hal ini dengan semakin datangnya wisatawan dalam jumlah besar maka perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan, keinginan dan harapan dari para wisatawan.
2. Dapat meningkatkan kesempatan kerja yaitu dengan dibangunnya restoran dan hotel juga vila akan dibutuhkan tenaga kerja yang profesional di bidang pariwisata dalam jumlah yang cukup besar.
3. Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh akibat dari multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relative cukup besar.
4. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah karena setiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.

5. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Bruto* (GDB)
6. Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.
7. Dapat memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pariwisata mengalami surplus dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu :

1. *Something to see* adalah obyek pariwisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut.
2. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata disana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas

rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal disana.

3. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.⁸

Pada prosesnya dalam pengembangan pariwisata disetiap Negara pasti mengalami hambatan, terutama Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan banyak bermacam-macam adat-istiadat kebudayaan, bahasa, kondisi daerah atau medan dan lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menciptakan kebijakan untuk pengembangan sektor Pariwisata.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan/atau tantangan bagi Indonesia baik yang terjadi saat ini maupun yang akan datang diantaranya yaitu :

1. Adanya berita tentang kerusakan, kebakaran hutan dan kondisi yang

kurang baik yang terjadi di Indonesia cukup menjadi bahan yang dapat dijual oleh beberapa pihak dan/atau Negara yang tidak menyukai Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk segera menciptakan keamanan. Keamanan merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu kerjasama antara Pemerintah dan seluruh komponen bangsa yang ada dalam menciptakan keamanan sangatlah dibutuhkan apabila ingin kegiatan sektor pariwisata berkembang dengan pesat.

2. Sistem informasi yang kurang memadai juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengelolaan pariwisata. Sistem informasi ini sangat penting dalam menyampaikan kondisi situasi daerah-daerah di Indonesia, memberikan informasi tentang obyek wisata, kesiapan sarana dan prasarana di tempat obyek wisata, serta melakukan promosi tentang keindahan Indonesia ke Negara-negara lain.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan yang cukup berat

⁸ Gudang Ilmu, 2013, *Konsep Dasar Pariwisata*, available from : <https://konsepblackbook.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-pariwisata.html>

bagi pengembangan pariwisata. Pariwisata sangat mementingkan profesionalisme baik dalam pengelolaan investasi maupun dalam bidang perhotelan, transportasi, komunikasi, dan informasi. Walaupun pariwisata telah membuka peluang yang besar bagi masyarakat daerah sekitar tempat pariwisata, akibat SDM yang kurang berkualitas dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan industry sketor pariwisata.

4. Akibat dari rendahnya mutu SDM yang ada dan ditambah minimnya modal dalam negeri untuk pengelolaan pariwisata akan membuka kemungkinan bahwa pariwisata akan dikuasai oleh Pihak Asing yang memiliki SDM lebih baik dan modal lebih banyak. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya kebijakna dari pemerintah misalnya membentuk regulasi dalam hal investasi, pemanfaatan tenaga kerja asing dan lain-lain.
5. Belum meratanya arus penerimaan wisatawan di masing-masing Daerah Tempat Wisata (DTW) missal di beberapa DTW sangat

ramai oleh wisatawan sedangkan di DTW lain sangat sepi. Hal tersebut bisa dikarenakan DTW tersebut kurang menarik dan/atau kurang promosi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yaitu promosi dan perombakan agar DTW tersebut dapat di lirik oleh wisatawan karena menarik untuk dikunjungi.

6. Hal yang paling ditakutkan dengan adanya perkembangan sektor pariwisata yang membuat banyak orang dari Negara berbeda dengan adat istiadat yang juga berbeda dari Indonesia membawa beberapa dampak dalam hal budaya, pergeseran nilai-nilai adat yang dapat mengarah kepada komersialiasi, timbulnya industri sex dan sebagainya. Hal tersebut harus mendapat perhatian serius agar keutuhan dan nilai-nilai budaya tetap diperhatikan dan menjadi prioritas utama.

Untuk itu agar dapat mengembangkan suatu kawasan pariwisata, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya fasilitas yang baik misalnya penambahan sarana umum, telekomunikasi, hotel, restaurant

- dan sentra-sentra pasar, serta lainnya.
2. Infrastruktur yang baik yaitu sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, jalan raya, keamanan dan lain-lain.
 3. Sistem transportasi umum yang mudah diakses, terjangkau, bersih, dan aman.
 4. Keramahmatan masyarakat terhadap para wisatawan yang berkunjung. Hal tersebut akan mampu.
 5. Atraksi-atraksi yang disuguhkan di tempat wisata untuk menarik wisatawan agar berkunjung kesaana.

Jika pemerintah dapat menghadapi setiap tantangan yang ada dalam sektor pariwisata maka bukanlah suatu hal yang tidak mungkin jumlah kunjungan para wisatawan baik wisatawan lokal maupun internasional akan mencapai target pemerintah yang diharapkan setiap tahunnya. Namun tentu saja hal itu adalah hal yang tidak mudah karena pemerintah harus dapat merangkul banyak pihak diantaranya pengusaha biro perjalanan, perhotelan, maskapai penerbangan, dan para pelaku bisnis

terkait. Pemerintah harus membuktikan pada dunia bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia tidak kalah dengan Negara-lain.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian jurnal ini adalah :

1. Kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata adalah dengan cara terencana dan menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang efisien dan optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan lebih baik lagi dalam pengembangan pariwisata pada saat ini.. Peranan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik) yang sangat memadai, memperluas berbagai bentuk fasilitas memberikan yang terbaik,

kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri

2. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia adalah :

- a. Adanya fasilitas yang baik misalnya penambahan sarana umum, telekomunikasi, hotel, restaurant dan sentra-sentra pasar, serta lainnya.
- b. Infrastruktur yang baik yaitu sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, jalan raya, keamanan dan lain-lain.
- c. Sistem transportasi umum yang mudah diakses, terjangkau, bersih, dan aman merupakan yang diinginkan bersama.
- d. Keramahtamahan masyarakat terhadap para

wisatawan yang berkunjung sangat diperlukan demi kemajuan dunia pariwisata.

- e. Atraksi-atraksi yang disuguhkan di tempat wisata untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke sana. Hal tersebut memberikan daya tarik bagi pariwisata untuk mendatangi daerah-daerah yang mereka tuju.

2. Saran

Saran yang dapat diambil dari penelitian jurnal ini adalah :

1. Pemerintah harus benar-benar serius dalam mempertimbangkan kebijakan disektor pariwisata agar tepat guna dan tepat sasaran. Demi kemajuan perkembangan daerah pariwisata di Indonesia.
2. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi disektor pariwisata, pemerintah harus turun kelapangan dan memngambil tindakan

sesegara mungkin apabila terjadi ketidak sesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaanya dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Said Zainal Abidin, 2002, Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung, Alfabeta.

Made Bayu, 2012, Pariwisata Bali dan Global, available from : <http://madebayu.blogspot.com/2012/02/perencanaan-dan-pengembangan.html>. Data diakses pada tanggal 10-10-2019
Hermawan, Heri, 2008, Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 3No. 1Maret 2008, ISSN1907-9419.

W.Mahdayani, 2009, Ekowisata Panduan Dasar Pelaksana Nias, Unesco & Nias Selatan, Dinpudbar Nias Selatan.

Ida Bagus Wiyasa Putra et. Al, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Cet. I, Bandung, Refika Aditama.

Gudang Ilmu, 2013, Konsep Dasar Pariwisata, available from : <https://konsepblackbook.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-pariwisata.html>.